

**PERKEMBANGAN PERMUKIMAN MASYARAKAT TIONGHOA  
DI PALEMBANG PASCA KESULTANAN PALEMBANG (1852-1942)  
(SUMBANGAN MATERI PELAJARAN IPS KELAS VIII DI SMP  
NEGERI 33 PALEMBANG)**

**Eva Febrian**

*Alumni Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya*

**Yunani Hasan, Farida**

*Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya*

***Abstract:** This study, entitled "The Development of Chinese Society settlements in Palembang Post Palembang Sultanate (1825-1942) as a contribution Lessons IPS Class VIII in Smp Negeri 33 Palembang". The research methodology used is the method of historical research with pengumpul data through documentation, interviews and studies kepustakaan. The issues discussed in this study is what lies behind the establishment of settlements in the Chinese community in the Sultanate Raft house and how the development of Chinese society settlement after the end of administration in Palembang Sultanate (1825-1942). The results showed that the underlying settlement Raft Chinese community at home because of political policies of government of the Sultanate of Palembang. Then the development of Chinese society after the settlement of the Palembang Sultanate due to the Chinese community was given permission by the Dutch colonial administration to settle in the land and expand settlements. Palembang early settlement of the Chinese community in the mainland on the mark with the founding of the Chinese settlement in the Village and the Village 9/10 7 Ulu Ulu Palembang.*

***Keywords:** Chinese Settlement, Palembang Sultanate*

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul “Perkembangan Permukiman Masyarakat Tionghoa di Palembang Pasca Kesultanan Palembang (1825-1942) sebagai Sumbangan Materi Pelajaran IPS Kelas VIII di Smp Negeri 33 Palembang”. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan proses pengumpul data melalui dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi terbentuknya permukiman masyarakat Tionghoa di rumah Rakit pada masa Kesultanan dan bagaimana perkembangan permukiman masyarakat Tionghoa setelah berakhirnya pemerintahan Kesultanan di Palembang (1825-1942). Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi permukiman masyarakat Tionghoa di rumah Rakit karena kebijakan politik dari pemerintahan Kesultanan Palembang. Kemudian berkembangnya permukiman masyarakat Tionghoa pasca Kesultanan Palembang dikarenakan masyarakat Tionghoa diberikan izin oleh pemerintahan Kolonial Belanda untuk bermukim di daratan dan memperluas wilayah permukimannya. Permukiman awal masyarakat Tionghoa Palembang di daratan di tandai dengan berdirinya perkampungan Tionghoa di Kelurahan 7 Ulu dan Kelurahan 9/10 Ulu Palembang.

**Kata kunci:** Permukiman Tionghoa, Kesultanan Palembang.

## PENDAHULUAN

Palembang merupakan kota lama yang menjadi tujuan imigrasi masyarakat asing dari berbagai daerah seperti orang-orang Tionghoa. Pada masa berdirinya kerajaan Sriwijaya di Palembang, hubungan orang-orang Tionghoa dengan Sriwijaya dapat dilihat dari catatan perjalanan Cina yang di tulis oleh pendeta agama Budha yang bernama I-Tsing. Ia datang ke Palembang pada tahun 671 Masehi dan tinggal di Sriwijaya selama enam bulan untuk mempelajari bahasa sansekerta sebelum bertolak ke India. Kerajaan Sriwijaya adalah pusat agama Budha dan tempat yang ideal untuk melakukan persiapan belajar di India, Ia menyarankan pelajar-pelajar Cina untuk menetap di Sriwijaya beberapa lama sebelum menempuh pelajaran agama yang lebih tinggi di Perguruan Nalanda, India. Selain sebagai pusat pelajaran agama Budha, yang menjadi daya tarik utama sehingga mendatangkan imigran-imigran Tionghoa ini adalah arus perdagangan dan kegiatan ekonomi di ibu kota Palembang. Banyak pedagang-pedagang Cina yang datang ke Palembang membawa barang dagangannya berupa kain sutra dan keramik-keramik Cina. Kedatangan imigran-imigran Tionghoa terus mengalami peningkatan, baik yang datang perorang maupun yang datang secara berkelompok (Zubir dkk, 2012:31-32).

Pasca kekuasaan kerajaan Sriwijaya di Palembang (abad ke-13), terjadi kekosongan kekuasaan yang berlangsung selama 200 tahun. Pada masa kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh perompak-perompak dari negeri Cina yang datang bersama keluarganya dan menjadikan wilayah Palembang sebagai tempat bermukim yang baru dan disusul oleh pengusaha-pengusaha Cina yang banyak melarikan diri ke Palembang untuk menghindari tirani dari Dinasti Ming di Cina. Pengaruh kedatangan orang Tionghoa selanjutnya adalah Laksamana Cheng Ho pada tahun 1407 di Palembang, ia seorang

Tionghoa Muslim dari Tiongkok. Dalam perjalanannya sebanyak tujuh kali, Cheng Ho sempat empat kali berkunjung ke Palembang. Kunjungan Cheng Ho selain mempererat hubungan perdagangan dengan Palembang, ia mempunyai tujuan khusus untuk melakukan penangkapan pada Chen Zuyi yaitu ketua dari kawanan perompak Cina di Palembang untuk menghadap kaisar Dinasti Ming. Kehadiran Laksamana Cheng Ho yang terakhir kali dengan membawa ribuan awak dari dataran Cina, meninggalkan sebagian dari pengikutnya untuk menetap di wilayah Palembang. Sebagian dari pengikutnya yang tinggal di Palembang juga membawa pengaruh terhadap perkembangan masyarakat Tionghoa yang ada di Palembang (Utomo, 2012:152-155).

Meskipun masyarakat Tionghoa di Palembang telah masuk dan berkembang dari masa berdirinya kerajaan Sriwijaya hingga kekosongan kekuasaan di Palembang, namun menurut data arkeologi mengenai keberadaan permukiman masyarakat Tionghoa tersebut baru tercatat setelah terjadinya kekosongan kekuasaan atau masa berdirinya kerajaan Islam di Palembang, sekitar pertengahan abad ke-16. Keberadaan permukiman masyarakat Tionghoa pada masa Kesultanan ini bertempat tinggal di rumah-rumah Rakit. Peraturan pada masa pemerintahan Kesultanan mewajibkan seluruh masyarakat asing termasuk masyarakat Tionghoa yang ada di Palembang untuk membentuk permukiman di atas sungai Musi dengan mendirikan rumah-rumah Rakit (Wawancara dengan Retno Purwanti, 28 Mei 2014).

Alasan sultan-sultan membentuk permukiman masyarakat Tionghoa di rumah Rakit, karena kekhawatiran Sultan jika masyarakat Tionghoa ini akan menjadi sebuah ancaman. Jika sewaktu-waktu mereka akan melawan Kesultanan, orang-orang Tionghoa tersebut bisa dikuasai hanya dengan membakar rakit-rakit tersebut. Sedangkan wilayah daratan hanya ditempati sultan-sultan

dan masyarakat pribumi. Alasan pihak Keraton untuk mengatur tata letak permukiman masyarakat yang ada di Palembang khususnya masyarakat Tionghoa ini karena tanah di daratan hanyalah milik Kesultanan dan masyarakat asli Palembang. Bagi orang-orang Tionghoa tidak berhak atas tanah-tanah tersebut, jika mereka masih ingin tinggal di wilayah Palembang maka harus bersedia di tempatkan di rumah-rumah Rakit dan patuh terhadap peraturan-peraturan Kesultanan (Sevenhoven, 1971:21).

Permukiman masyarakat Tionghoa di rumah-rumah Rakit membentuk pola linear yang berdiri mengikuti sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Musi. Penempatan permukimannya di bagian Seberang Ulu sungai Musi dan dihadapkan ke arah Keraton atau berseberangan dengan Keraton Kesultanan. Sedangkan bagi Keraton Sultan dan permukiman para Bangsawan berada di bagian Seberang Ilir sungai Musi. Pengaturan tata letak permukiman tersebut sengaja dibentuk untuk memudahkan pengawasan pihak Kesultanan terhadap masyarakat Tionghoa dan juga masyarakat asing lainnya yang tinggal di rakit-rakit tersebut (Zubir, dkk, 2012:36).

Jumlah masyarakat asing lainnya seperti orang India, Inggris, Spanyol, Belanda, Campa dan Siam sangat minoritas dibandingkan dengan masyarakat Tionghoa yang lebih mayoritas. Jumlah masyarakat Tionghoa yang tinggal di rakit-rakit tersebut diperkirakan sekitar 800 jiwa. 800 jiwa Tionghoa merupakan jumlah etnis asing (Tionghoa) terbanyak dibandingkan dengan jumlah etnis asing lainnya. Jumlah masyarakat Tionghoa yang mendominasi di rakit-rakit, menjadikan rumah-rumah rakit tersebut yang paling banyak mendapatkan sentuhan arsitektur dari budaya Cina. Bentuk atap rumah Rakit yang melengkung, konstruksi kuda-kuda balok segiempat dan bentuk bangunannya yang cenderung simetris merupakan cirikhas bangunan arsitektur

budaya Cina. Mayoritas pembuatan rumah Rakit pada masa ini terbuat dari kayu dan bambu dengan atap kajang dari *Nipah* (Sevenhoven, 1972:33 ; Jaya, 2012:1).

Kehidupan permukiman masyarakat Tionghoa di rumah-rumah Rakit pada masa Kesultanan memang bertolak belakang dengan kehidupan etnis asing dari Arab, masyarakat Arab yang tinggal di ibukota Palembang diperbolehkan oleh sultan-sultan untuk mendirikan rumah didaratan dengan membentuk perkampungan rumah-rumah panggung dari kayu. Alasan khusus bagi sultan memperbolehkan orang Arab ini untuk tinggal di ruang darat karena status masyarakat Arab yang memiliki kesamaan agama dengan Kesultanan dan mereka yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad (Jaya, 2012:1).

Mengenai aktifitas masyarakat Tionghoa di rumah-rumah Rakit cenderung memiliki keterbatasan, mereka melakukan kegiatan hanya di sekitaran ruang air saja dan mayoritas usaha yang dilakukan sebagai pedagang. Dalam hal berdagangpun masih harus bersaing dengan pendatang-pendatang yang berasal dari Arab dan etnis asing lainnya. Di perahu-perahu yang ukurannya kecil di sungai Musi atau yang biasa mereka sebut dengan *Wangkang*, yang mirip dengan kapal atau jung Cina namun ukurannya lebih kecil, masyarakat Tionghoa biasanya akan menjajakan barang dagangannya berupa barang pecah belah dari Cina, kain linen, benang emas, sutra, dan obat-obatan. Kegiatan barter barang juga sering dilakukan di perahu-perahu kecil tersebut (Novita, 2006:40; Jaya, 2012:1).

Data-data arkeologi mengenai rumah Rakit Tionghoa tertua hanya tersimpan dalam bentuk dokumentasi, yaitu rumah Rakit Tionghoa pada tahun 1950-an. Peninggalan arkeologi berupa permukiman rumah Rakit masyarakat Tionghoa yang ada pada masa Kesultanan, tidak dapat dijumpai lagi karena bahan pembuatannya yang terbuat dari kayu

atau bambu akan mudah hancur jika terlalu lama terendam oleh air (Wawancara dengan Retno Purwanti, 28 Mei 2014).

Jelaslah bahwa permukiman-permukiman masyarakat Tionghoa muncul pertama kali di Palembang pada masa Kesultanan Palembang berdiri, meskipun pada awalnya mereka sudah hadir sejak berdirinya kerajaan Sriwijaya. Kesultanan Palembang mengatur tata letak permukiman masyarakat Tionghoa di rumah-rumah Rakit bagi mereka yang tinggal di Palembang. Permukiman masyarakat Tionghoa diletakkan di bagian seberang Ulu atau berhadapan dengan Keraton sultan yang berada di Seberang Ilir. Pengaturan bermukimnya di rumah-rumah Rakit merupakan makna pengawasan agar ketika sewaktu-waktu mereka melakukan pemberontakan, Sultan akan mudah melumpuhkan mereka dengan cara membakar rakit-rakit tersebut.

## PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Permukiman Masyarakat Tionghoa di Palembang Pasca Pemerintahan Kesultanan Palembang (1825-1942)

Berkembangnya suatu permukiman-permukiman mengikuti perkembangan jumlah penduduknya, penduduk mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan suatu permukiman (Yunus, 1987:3). Bagi masyarakat pendatang seperti masyarakat Tionghoa, tiga tahap yang berkaitan langsung dengan perkembangan pemukiman masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah; pertama, perkembangan struktur pemukiman yang ditandai masuknya pendatang-pendatang dari Daratan Cina ke Indonesia yang umumnya bertujuan berdagang, diikuti oleh tahap perkembangan struktur pemukiman modern yang dibangun oleh orang-orang Eropa sekitar abad ke-17 kemudian terbentuknya berbagai pemukiman yang menampilkan sosok pengaruh industrialisasi

Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Wibowo, 2001:194).

### B. Permukiman Masyarakat Tionghoa di Perkampungan “*Wijkenstesel*”

Kota Palembang pada pasca pemerintahan Kesultanan atau periodisasi kekuasaan Kolonial Belanda pada tahun 1823, permukiman masyarakat Tionghoa mengalami perubahan yang sangat besar dan berpengaruh terhadap perkembangan permukiman mereka di Palembang. Pasca Kesultanan, peraturan pembagian lahan atau tanah tidak lagi diperuntukan hanya untuk keluarga keraton dan masyarakat asli Palembang saja. Pemerintahan Kolonial Belanda di Palembang mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan semua permukiman masyarakat Tionghoa yang berada di rumah-rumah Rakit untuk pindah dan membangun permukiman di ruang darat. Permukiman masyarakat Tionghoa di daratan ditandai dengan berdirinya rumah pemimpin masyarakat Tionghoa (Kampung Kapiten) yang berada di Kelurahan 7 Ulu Palembang. Selain perkampungan Tionghoa yang ada di Kelurahan 7 Ulu Palembang, kawasan kedua yang menjadi permukiman masyarakat Tionghoa terdapat di Kelurahan 9 dan 10 Ulu Palembang. Pada periode pemerintahan Kolonial Belanda di Palembang, permukiman masyarakat Tionghoa yang berpindah ke wilayah daratan ditempatkan pada suatu perkampungan tersendiri yang disebut dengan “*Wijkenstesel*”. Permukiman masyarakat Tionghoa dari hunian di atas air berpindah ke ruang daratan berangsur-angsur memenuhi kapasitasnya seiring dengan arus migrasi Tionghoa yang terjadi secara besar-besaran pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19. Derasnya arus migrasi dari imigran-imigran Tionghoa tersebut membanjiri permukiman Tionghoa yang berada di Palembang (Adyanto, 2006:17 ; Zubir, 2012:36).

Di era kolonialisasi Belanda ini, arus imigrasi Tionghoa yang berasal dari tahun 1800-an hingga 1900-an terdiri dari beberapa

tahap, yang pertama merupakan arus migrasi Tionghoa yang terjadi tahun 1882, imigran Tionghoa dalam periode ini mayoritas imigran yang berasal dari petani-petani dan kuli-kuli yang bertudung lebar dan berkepang panjang, mereka mencari kehidupan yang lebih layak dikarenakan keadaan negerinya yang mengalami kesulitan ekonomi dan sering mengalami kerusuhan akibat pemerintahan Dinasti Manchu di negeri Cina. Meletusnya perang Candu dari tahun 1839-1842 merupakan penyebab faktor pendorong masuknya imigran Tionghoa. Kemudian disusul pada tahun 1882-1943 jumlah imigran Tionghoa memang tidak sebanyak pada gelombang sebelumnya, mereka yang datang pada periode ini kebanyakan datang perorangan dan berasal dari keluarga yang berada (Zubir dkk, 2012:25-28 ; Utomo 2008:47 ; Ricklefs, 2013:227).

Sebagian dari masyarakat Tionghoa yang bermukim tersebut sebenarnya tidak berniat untuk menetap di perantauan, namun sikap politik yang ada di negeri Cina pada masa kekaisaran Dinasti Ming dan diteruskan oleh Dinasti Manchu, melanggar semua hubungan dan perdagangan di luar negeri, bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut akan mendapatkan hukuman pancung. Masyarakat Tionghoa yang berada di perantauan takut mendapatkan hukuman jika mereka kembali pulang ke negerinya. Akibat peraturan-peraturan tersebut, masyarakat Tionghoa memilih untuk tinggal dan mencari kehidupan yang baru di perantauan (Utomo, 2008:47).

Di ruang darat, sistem perkampungan Tionghoa di Palembang yang diciptakan pada masa Koloni ini dibagi berdasarkan sistem administrasi. Khusus di ibukota Palembang terbagi dalam dua distrik yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Distrik Seberang Ulu dibagi menjadi 14 kampung dan distrik Seberang Ilir terdiri dari 37 kampung. Semua perkampungan khusus warga Tionghoa ditempatkan dibagian Seberang Ulu atau

tepatnya berada disisi Selatan Sungai Musi (Lampiran 1) (Santun, dkk, 2010: 47).

Perkampungan Tionghoa yang berada di distrik Seberang Ulu, tepatnya di Kelurahan 7 Ulu Palembang merupakan rumah pemimpin masyarakat Tionghoa yang diangkat pemerintah Belanda sebagai *Kapiten Cina*. Tugas utama Kapiten Cina adalah mengurus dan menjaga kebutuhan penduduk di perkampungannya. Kapiten Cina yang diangkat oleh Kolonial-Belanda pada tahun 1855 adalah Tjoa Him Hin. Pangkat Kapitan pada Kapten Tjoe Him Han merupakan pangkat dari pemerintahan Kolonial Belanda sebagai orang yang diberi kebebasan untuk mengatur pemerintahan di daerahnya sendiri dan setiap daerah yang diatur harus selalu memberikan upeti. Keberadaan permukiman di perkampungan Kapiten atau rumah Kapiten ini tepat berada di sisi selatan sungai Musi dan beseberangan sungai dengan rumah Keresidenan Belanda yang berada di sebelah utara sungai Musi. Mayoritas permukimannya merupakan rumah-rumah yang berbentuk panggung dengan arsitektur campuran dari Cina, Palembang dan Eropa (Novita, 2006:41; Zubir, 2012:36).

Permukiman di perkampungan Tionghoa di Kelurahan 7 Ulu Palembang, mayoritas dari penduduk Tionghoanya mempunyai hubungan persaudaraan dengan Kapiten Cina. Permukiman ini berdiri sekitar tahun 1800-an, atau setelah runtuhnya Kesultanan di Palembang. Perkampungan Tionghoa di Kelurahan 7 Ulu ini merupakan kelompok 15 bangunan rumah panggung ala Cina dan memiliki tiga bangunan inti. Bangunan inti yang pertama dan ketiga merupakan tempat tinggal atau difungsikan sebagai tempat sembahyang, sedangkan kedua yang berada di antara bangunan pertama dan bangunan ketiga merupakan kantor dinas Kapiten Cina yang bekerja pada masa Kolonial Belanda di Palembang (Novita, 2006:41 ; Wawancara dengan Bapak Mulyadi, 24 Mei 2014).

Permukiman Tionghoa di Palembang selanjutnya terdapat di Kelurahan 9 dan 10 Ulu Palembang dan berada di distrik bagian Seberang Ulu. Kawasan ini merupakan kawasan kedua pekampungan Tionghoa setelah perkampungan Tionghoa di Kelurahan 7 Ulu Palembang. Keistimewahan dari permukiman Tionghoa di Kelurahan 9 dan 10 Ulu ini, kawasannya mempunyai sebuah Kelenteng tertua yang dibangun pada tahun 1839, yaitu Kelenteng Candra Nadi Palembang atau *Soei Goeit Kiong*. Di sekitaran bangunan Kelenteng tersebut terdapat permukiman orang-orang Tionghoa yang mendirikan bangunan rumah yang saling berdempetan. Bangunan rumah mereka berbentuk atap khas gaya arsitektur Cina, yaitu atap pelana dengan bentuk kerpus melengkung. Sebuah Kelenteng didalam suatu permukiman masyarakat Tionghoa merupakan elemen utama dalam terbentuknya permukiman masyarakat Tionghoa. Permukiman Tionghoa yang ada di perkampungan 9 dan 10 Ulu ini merupakan tempat permukiman yang paling banyak memiliki Kelenteng-kelenteng dari umat Tridarma dibandingkan dengan tempat permukiman Tionghoa yang lainnya di Palembang. Kelenteng-kelenteng tersebut besebaran di beberapa titik-titik yang ada di permukiman 9 dan 10 Ulu Palembang. Kapal-kapal yang berasal dari orang-orang Tionghoa yang berlabuh di kawasan ini, sering singgah untuk melakukan ritual sembahyang, mereka biasanya membawa patung-patung umat Tridarma untuk di masukkan ke Kelenteng Candra Nadi. Patung-patung dewa dan benda-benda yang ada di Kelenteng tersebut merupakan peninggalan-peninggalan kuno yang berasal dari Cina (Wibowo, 2001:197 ; Novita, 2006:41 ; Wawancara dengan Tjik Harun, 02 Juni 2014). Masyarakat Tionghoa yang berangsur-angsur mulai meninggalkan pola permukiman lama yang ada di rumah Rakit. Sedangkan pola permukiman masyarakat Tionghoa di ruang

darat atau di perkampungan biasanya dikenal dengan kelompok yang eksklusif. Hal tersebut terjadi karena sifat mereka yang lebih suka mengelompok. Meskipun hidup mereka mengelompok, masyarakat Tionghoa tetap hidup berdampingan dengan damai dengan masyarakat pribumi dan etnis asing lainnya. Kedudukan masyarakat Tionghoa terutama pada masa pemerintahan Kolonial Belanda memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan masyarakat pribumi dan etnis asing lainnya. Kedudukan sosial mereka sebagai orang nomor dua dalam strata sosial kolonial atau sebagai perantara antara golongan Eropa dan golongan Pribumi (Rahardjo, 2007:46).

Terbentuknya permukiman-permukiman Tionghoa di perkampungannya pada masa kolonial Belanda ini merupakan generasi-generasi awal Tionghoa yang bermukim di Palembang (Taqwa, 2013:9). Asal-usul mereka sendiri bersal dari berbagai suku bangsa yang ada di negeri Cina, yaitu Hokkien, Hakka, Teo-Chiu dan Kanton. Suku bangsa Hokkien dikenal dengan suku bangsa yang memiliki jiwa dagang, Hakka dan Teo-Chiu merupakan suku bangsa dari wilayah pedalaman di negeri Cina, suku ini oleh pemerintahan Belanda dipekerjakan di wilayah-wilayah pertambangan di Kalimantan dan Sumatera, sedangkan suku Kanton dikenal dengan suku bangsa yang mayoritas bekerja sebagai kuli pertukangan. Mayoritas suku bangsa Cina yang menyebar di wilayah Palembang berasal dari suku bangsa Hokkien (Zubir, 2012:31 ; Utomo, 2012:144).

Permukiman masyarakat Tionghoa didaratan secara administrasi semakin bertambah luas seiring berkembangnya aktifitas perdagangan dan pembukaan lahan perkebunan yang semakin meningkat di Sumatera Selatan. Puncaknya pada tahun 1919, ketika sistem perkampungan bagi etnis asing (Tionghoa) yang diciptakan pada masa Koloni Belanda dihapuskan, masyarakat Tionghoa semakin memiliki kebebasan untuk

bermukim dimanapun yang mereka kehendaki, termasuk permukiman yang membaur dengan masyarakat Pribumi dan etnis asing lainnya hingga ke wilayah-wilayah pedalaman (Santun, 2011:118 ; Musianto, 2003:203).

Pemberian konsesi tanah juga dipermudah dan prospek komoditas pertanian karet dan teh serta pertambangan (batu bara dan minyak bumi) terlihat semakin menjanjikan, para penguasa asing seperti orang-orang Barat dan sebagian komunitas Tionghoa, akhirnya berlomba-lomba mengeksploitasi daerah Palembang. Para pedagang karet pribumi kalah dalam menghadapi pengusaha etnis Tionghoa yang jaringan dagangnya merentang dari desa-desa sampai ke kota pelabuhan Palembang pada abad ke-19 sampai dasawarsa pertama abad ke-20 (Mestika Zed, 2003:68-69 ; Hidajat, 1984:138).

Berkembangnya suatu permukiman-permukiman mengikuti perkembangan jumlah penduduknya. Faktor bertambahnya penduduk berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu permukiman (Yunus, 1987:3). Sama halnya dengan meluasnya permukiman masyarakat Tionghoa di Palembang diiringi dengan jumlah penduduk Tionghoa yang semakin memadat. Jumlah masyarakat Tionghoa semakin tahun mengalami peningkatan yang drastis, dari jumlah penduduk Tionghoa yang berkisar 800 jiwa pada masa Kesultanan, meningkat pesat paca pemerintahan Kesultanan di Palembang. Peningkatan tersebut terjadi karena arus migrasi yang terjadi secara terus-menerus hingga pertengahan abad ke-19 atau periode pemerintahan Kolonial Belanda. Pada tahun 1855, jumlah penduduk Tionghoa di Palembang mencapai 2.504 jiwa, kemudian pada tahun 1915 bertambah menjadi 7.000 jiwa Tionghoa yang bermukim di Palembang. Hingga puncaknya pada tahun 1930 dilakukan sensus yang pertama, jumlah orang Tionghoa di Palembang berkisar 26.000 jiwa.

Pertambahan jumlah tersebut merupakan jumlah dari keseluruhan orang-orang Tionghoa yang sudah menyebar ke berbagai wilayah di Palembang (Amran dalam Berita Pagi, Minggu 25 November 2012 ; Zubir, 2012:24).

Pada 12 Februari tahun 1942, masuknya Jepang ke Palembang menggantikan posisi kedudukan pemerintahan Kolonial Belanda. Seluruh pasukan pertahanan Belanda di pukul mundur oleh tentara Jepang yang masuk ke Palembang melalui lintas udara. Tujuan utama Jepang untuk menguasai wilayah Palembang karena ingin menjalankan mesin pendukung perangnya, Sumatera Selatan yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan bauksit menjadikan Palembang sebagai tempat yang menguntungkan bagi pasukan tentara Jepang (Mahmud, 2007:70-71).

Pada masa pendudukan Jepang di Palembang (1942), permukiman masyarakat Tionghoa yang sudah meluas ke berbagai daerah yang ada di Palembang secara kultural tidak mengalami perubahan peraturan permukiman, hanya saja perubahan yang nama pada setiap perkampungan yang sudah ada, dirubah nama menjadi *Ku-Co* dan mereka di bawah kordinasi *Gun-Co*. Untuk lebih merapatkan barisan dikalangan penduduk di Palembang, diperkenalkan juga suatu sistem lingkungan Jepang di dalam setiap perkampungan yang bernama *Tonari-gumi*, yaitu Rukun Tetangga. Rukun Tetangga meliputi setiap 10 rumah yang ada di dalam satu Kampung dan dipimpin oleh seorang *Ku-Mi-Co* atau Ketua RT. Semua kegiatan yang ada disetiap permukiman hanya ditujukan untuk pembangunan ekonomi peperangan Jepang (Pemerintah Kota Palembang, 2006:11).

### **C. Makna Tempat Bermukimnya Masyarakat Tionghoa di Palembang**

Perubahan tempat bermukimnya masyarakat Tionghoa dari setiap pergantian kekuasaan di Palembang mempunyai makna. Perubahan makna tempat bermukim

masyarakat Tionghoa tersebut terjadi dari awal pemerintahan Kesultanan Palembang hingga kekuasaan Kolonial Belanda di Palembang.

Makna tempat bermukimnya masyarakat Tionghoa mengalami perubahan yang cukup besar pasca Kesultanan Palembang, *“Dari posisi pengawasan berubah menjadi ruang “sahabat” dengan ruang bersama di sungai Musi”*.<sup>1</sup> Permukiman masyarakat Tionghoa juga mendapatkan kedudukan yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Meskipun pada awal pemerintahan Kolonial Belanda, mereka masih mendapatkan pengawasan yang ketat namun seiring berkembangnya zaman pada masa Kolonial Belanda di Palembang, masyarakat Tionghoa merupakan pedagang perantara yang memegang peranan yang penting terhadap perkembangan perekonomian di Palembang (Adyanto, 2006:3). Peranan penting tersebut menjadikan kedudukan masyarakat Tionghoa sebagai masyarakat kelas dua yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan masyarakat pribumi dan masyarakat asing lainnya. Pemerintahan Belanda tidak hanya membebaskan mereka membangun rumah dan gudang di daratan, tetapi juga memberi kesempatan kepada mereka untuk memperluas perdagangan hingga ke wilayah pedalaman. Pemukiman-permukiman masyarakat Tionghoa di daratan semakin banyak bermunculan pada saat aktifitas perdagangan semakin meningkat di ibukota Palembang (Rahardjo, 2007:54 ; Zubir dkk, 2012:23).

#### **D. Sumbangan Materi Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Negeri 33 Palembang**

Dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan guru dan peserta didik mengenai perkembangan permukiman masyarakat Tionghoa di Palembang khususnya pasca Kesultanan di Palembang atau periode

pemerintahan Belanda di Palembang. Dalam perkembangan permukiman Tionghoa yang ada di Palembang memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat Tionghoa di Palembang dari berbagai aspek, pertumbuhan masyarakat Tionghoa yang semakin meningkat dan permukiman-permukiman yang menjadi kawasan bagi komunitas Tionghoa. Tulisan yang berjudul Perkembangan Permukiman Masyarakat Tionghoa Pasca Kesultanan Palembang pada tahun 1825-1942 dapat dijadikan referensi dalam materi pembelajaran IPS (Sejarah) Kelas VIII kurikulum 2013. Khususnya pada materi sejarah mengenai pengaruh kebijakan pemerintah Kolonial di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada para peserta didik agar mempunyai karakter kebangsaan yang berakhlak mulia.

Peserta didik harus mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan pada masa pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia khususnya di wilayah Palembang memiliki dampak terhadap perkembangan permukiman masyarakat Tionghoa di Palembang. Salah satu peraturan pada masa pemerintahan Belanda di Palembang adalah peraturan tempat bermukim. Pada awalnya, sebelum masa pemerintahan Belanda di Palembang yaitu masa Kesultanan Palembang mewajibkan seluruh tempat tinggal orang Tionghoa bermukim di atas air, semua aktivitas mereka diawasi oleh pihak Kesultanan, jika mereka berani melawan maka tempat tinggal mereka di atas sungai Musi akan di bakar oleh Sultan-Sultan. Namun hal tersebut berubah setelah kota Palembang jatuh ke tangan Kolonial Belanda, seluruh pembatasan permukiman bagi masyarakat Tionghoa di bebaskan oleh Belanda untuk memiliki rumah didaratan dan bermukim dengan bebas meskipun pada awalnya hanya di tempatkan di perkampungan atau “Wijkenstetsel”. Kemudian peserta didik juga harus mengetahui bahwa pada periode pemerintahan Belanda, permukiman



masyarakat Tionghoa semakin berkembang dengan derasnya arus migrasi Tionghoa ke Palembang hingga pertengahan abad ke-19, bahkan ada yang sengaja didatangkan untuk bekerja di proyek pertambangan dan perkebunan milik Belanda di Sumatera Selatan.

Selain itu, sistem kurikulum 2013 yang berbasis *scientific* yang mengacu pada kemampuan keilmiah dan kreativitas pada siswa tidak lagi terpusat pada guru seperti kurikulum sebelumnya, sehingga penulisan skripsi ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menginformasikan peserta didik menjadi anak bangsa yang kreatif, berakhlak mulia, peduli dengan lingkungan alam dan menghargai peradaban bangsa di Indonesia. Materi ini juga mengajarkan kepada peserta didik agar menumbuhkan semangat nasionalisme didalam jiwa peserta didik dan perasaan saling menghargai, karena meskipun berbeda-beda satu sama lain baik secara ras, suku, bangsa serta keturunan namun tetap memiliki kepedulian dan rasa kasih sayang terhadap sesama.

## PENUTUP

Masuknya orang-orang Tionghoa pada masa Kesultanan di Palembang (abad ke-16) dipengaruhi oleh arus perdagangan dan kegiatan ekonomi, kemudian diikuti oleh keadaan di negeri Cina yang sering mengalami kerusuhan dan mengalami kesulitan ekonomi hingga meletusnya perang Candu pada tahun 1839-1842. Kondisi derasnya migrasi Tionghoa yang ada di Palembang mengkhawatirkan Sultan-sultan Palembang akan stabilitas pemerintahan Kesultanan. Dalam rangka tersebut pemerintah Kesultanan Palembang mengeluarkan kebijakan atas peraturan permukiman bagi masyarakat Tionghoa. Peraturan tersebut adalah bagi seluruh masyarakat Tionghoa yang ingin menetap di wilayah Palembang diwajibkan bertempat

tinggal di sungai Musi dengan mendirikan rumah-rumah Rakit. Masyarakat Tionghoa dilarang untuk bermukim dengan bebas, peraturan tata letak permukiman ini bermakna pengawasan, agar jika sewaktu-waktu masyarakat Tionghoa melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Kesultanan, maka Sultan-Sultan akan mudah mengepung mereka dengan membakar rakit-rakit tersebut.

Pasca pemerintahan Kesultanan Palembang (1825) yang digantikan oleh pemerintahan Kolonial Belanda merupakan awal dari fase-fase berkembangnya suatu permukiman masyarakat Tionghoa di Palembang, terutama pembangunan permukiman yang berada di daratan. Hal ini disahkan oleh pemerintah Kolonial Belanda di Palembang yang mengizinkan masyarakat Tionghoa untuk membangun permukiman-permukiman yang ada di daratan. Awal permukiman masyarakat Tionghoa di daratan ditempatkan dalam suatu perkampungan Tionghoa atau disebut dengan "*Wijkenstetsel*". Bukti permukiman awal masyarakat Tionghoa tersebut berada di Kelurahan 7 Ulu dan 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Perkembangan permukiman Tionghoa di daratan mulai bertambah banyak seiring arus migrasi Tionghoa yang terjadi secara besar-besaran hingga pertengahan abad ke-19, terutama ketika dihapuskannya "*Wijkenstetsel*" pada tahun 1919, memungkinkan untuk melakukan pembauran permukiman Tionghoa dengan permukiman pribumi. Hingga Februari 1942 masuknya pengaruh Jepang di Palembang, wilayah permukiman-permukiman Tionghoa sudah menyebar keberbagai daerah di Palembang. Pemerintahan Jepang tidak melakukan peraturan yang khusus terhadap permukiman masyarakat Tionghoa yang sudah ada, kegiatan di Palembang pada masa kependudukan Jepang hanya difokuskan untuk kepentingan pampasan perang Jepang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Johannes. 2006. *Kampung Kapitan Interpretasi 'JeJak' Perkembangan Permukiman dan Elemen Arsitektural, dalam Dimensi Teknik Arsitektur Vo. 34 No. 1 Juli 2006*. Palembang: Teknik Arsitektur Universitas Sriwijaya.
- Amran. 2012. "Kota Palembang, 1855". BERITA PAGI, 25 November 2012
- Hidajat. 1984. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*. Bandung: TARSITO)
- Jaya, Anjuma Perkasa. 2012. *Proporsi dalam Arsitektur Rumah Rakit Tradisional Palembang*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mahmud, Ki Agus Imran. 2007. *Sejarah Palembang*. Palembang: Anggrek Palembang.
- Musianto, Lukas S. 2003. *Peran orang Tionghoa dalam perdagangan dan hidup perekonomian dalam masyarakat dalam Jurnal Manajemen Vol.5, No.2, September*. Surabaya: Jurusan Ekonomi Management, Fakultas Ekonomi Universitas Petra.
- Mestika, Zed. 2003. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES.
- Novita, Aryandini. 2006. *Permukiman Etnis Arab*. Palembang: Balai Arkeologi Palembang.
- Pemerintah Kota Palembang dengan Badan Aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sriwijaya. 2006. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palembang 2005-2025*. Palembang: BALITEKS UNSRI.
- Rahardjo, Supratikno. 2007. *Pemukiman Lingkungan dan Masyarakat*. Jakarta: Ikatan ahli Arkeologi Indonesia.
- Ricklefs, dkk. 2013. *Sejarah Aisa Tenggara; Dari Masa Prasejarah Sampai Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Santun, Dedi Irwanto M. 2010. *Iliran dan Uluan; Dikotomi Dan Dinamika Dalam Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Eja Ombak.
- Sevenhoven, J.L. van. 1971. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Jakarta: Bhratara.
- Taqwa, M. Ridhah. 2013. *Pola Segregasi Ekologis: Kelompok Etnis-Suku Vs Kelas Sosial di Kota Palembang*. Palembang: Program Magister Sosiologi Fisip Unsri.
- Utomo, Bambang Budi. 2007. *Pandanglah Laut Sebagai Pemersatu Nusantara*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Palembang: Pemerintah Kota Palembang.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Musi Menjalin Peradaban Warisan Budaya Sebagai Identitas*. Balai Arkeologi Palembang bekerja sama dengan Tunas Gemilang Press: Palembang.
- Wibowo, I. 2001. *Harga Yang Harus di Bayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama Bekerja Sama Dengan Pusat Studi Cina.

Yunus, Hadi Sabari. 1987. *Subject Matter dan Metode Penelitian Geografi Permukiman Kota*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjadarmada.

Zubir, dkk. 2012. *Bunga Rampai: Sejarah Sumatera Selatan Dalam Kajian Sosial dan Ekonomi*. Padang: Padang Press.

Mulyadi. interview. 2014. "Permukiman masyarakat Tionghoa". Kampung Kapiten"

Purwanti, Retno interview.2014. "Permukiman masyarakat Tionghoa".Balai Arkeologi Palembang".

Harun, Tjik interview.2014. "Permukiman masyarakat Tionghoa."Kelenteng Candra Nadi Palembang"